

ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi di Kecamatan Telukbetung Selatan)

Oleh

HERLINA PURWANTHIE

Masalah penelitian ini yaitu kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak didukung oleh kewenangan yang memadai sesuai tupoksinya. Penelitian berfokus pada Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kecamatan serta penjabarannya dalam berbagai aspek pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sebagai wujud respon antisipatif terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam lingkup pemerintahan terkecil (Kecamatan),

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewenangan Camat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan khususnya dilihat dari perspektif New Public Service tidak didukung oleh kewenangan dan sumber pendanaan yang signifikan sehingga tupoksi camat tidak mampu memberikan fungsi pelayanan publiknya secara prima.

Masyarakat yang tidak paham terhadap kewenangan camat yang terbatas, akan menganggap pihak kecamatan tidak cepat tanggap atau bahkan tidak peduli terhadap permasalahan di wilayahnya. Ketika isu tersebut sampai ke walikota, camat akan mendapat teguran langsung karena kelalaiannya dan keterlambatannya dalam mengatasi masalah di wilayahnya.

Oleh karena itu, pelimpahan kewenangan kepada camat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan bisa dikategorikan sebagai pelimpahan delegatif.

Kata Kunci : *Pelimpahan kewenangan, kedudukan dan peran camat.*